

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) adalah program pemerintah untuk membantu buruh memiliki rumah dengan memotong tiga persen dari upah bulanan yang diterima. Namun, kebijakan tapera yang diluncurkan oleh pemerintah tidak mendapat respon yang begitu baik di masyarakat. Pelaksanaan kebijakan ini terkesan dipaksakan sehingga memunculkan gelombang penolakan dari masyarakat. Salah satu bentuk pemaksaan yang terlihat adalah adanya iuran wajib yang harus dibayarkan oleh setiap peserta program Tapera dan apabila peserta tidak membayar, maka peserta akan dijatuhi sanksi administratif. Sanksi administratif ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) (Verianty, 2024). Selain itu, terdapat aspek lainnya yang membuat masyarakat dengan tegas menolak kebijakan Tapera, yaitu pembiayaan perumahan sepenuhnya dibebankan pada buruh.

Menurut laporan dari media alternatif Koran Perdjoengan.com, pemerintah tidak berpihak kepada buruh dalam kebijakan Tapera dan memberatkan buruh. Terlihat bahwa dalam kebijakan Tapera, buruh tercekik akibat regulasi pemerintah yang ingin menyediakan akses perumahan, tetapi pembiayaan sepenuhnya dibebankan kepada buruh, sedangkan pemerintah tidak berpartisipasi sedikitpun

dalam pendanaan Tapera. Lebih lanjut, media alternatif Koran Perdjoengan.com menjelaskan bahwa kebijakan Tapera tidak masuk akal dan buruh menuntut pembatalan kebijakan Tapera. Disamping itu, media alternatif Koran Perdjoengan juga mengkritisi beberapa alasan mengapa kebijakan Tapera seharusnya dibatalkan, berikut beberapa uraian penting mengapa kebijakan Tapera tidak berpihak pada buruh dan merugikan buruh. Pertama, kebijakan Tapera tidak menjamin pesertanya dapat mempunyai rumah hanya dengan berbekal iuran sebanyak 3% dari upah yang diterima setiap bulan, dalam waktu sepuluh atau dua puluh tahun ke depan, buruh tidak akan dapat membeli rumah karena harga properti yang terus naik (Koran Perdjoengan, 2024).

Kedua, pemerintah lepas tanggung jawab dalam menyediakan rumah yang merupakan kebutuhan pokok rakyat. Tidak terdapat dalam Undang-Undang Tapera satu pun klausul yang menyatakan bahwa pemerintah ikut serta dalam iuran penyediaan rumah untuk buruh dan peserta program Tapera. Iuran dibayar oleh buruh dan juga pengusaha tanpa ada sumbangan dana APBN atau APBD yang digelontorkan oleh pemerintah untuk program perumahan tersebut (Koran Perdjoengan, 2024). Dapat dikatakan bahwa pemerintah lepas tanggung jawab, padahal pada Pasal 27 ayat (2) Perubahan UUD 1945 dikatakan bahwa warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Subawa, 2008).

Jika dilihat dari perspektif HAM, negara (pemerintah Indonesia) bertanggung jawab dan harus memenuhi kewajiban berupa harus menghormati, melindungi dan

memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan, negara memiliki kewajiban untuk menjamin dan melindungi warganya, atau dengan kata lain pemerintah harus mampu untuk mencukupi hak masyarakat atas pekerjaan dan kehidupan yang layak (Subroto, 2023). Artinya, negara bertanggung jawab dalam menyediakan kehidupan yang layak bagi buruh, tetapi pada kebijakan Tapera, pemerintah justru lepas tanggung jawab dalam menyediakan akses perumahan dan seluruh pembiayaan tersebut dibebankan kepada buruh dan pengusaha. Dengan kondisi pemerintah yang tidak berusaha memenuhi tanggung jawabnya, maka dapat diartikan bahwa pemerintah telah melanggar HAM.

Ketiga, kebijakan Tapera memberikan beban finansial yang berat untuk buruh. Potongan sebanyak 3% harus dibayar buruh disaat turunnya daya beli dan rendahnya upah minimum yang diterima akibat UU Cipta Kerja akan menjadi beban berat dalam membiayai kehidupan sehari-hari. Selain wacana Tapera, buruh dikenakan potongan hampir 12% setiap bulannya, diantaranya Pajak Penghasilan sebanyak lima persen, iuran jaminan kesehatan satu persen, iuran jaminan hari tua sebanyak dua (Koran Perdjoengan, 2024). Banyaknya potongan yang diberlakukan semakin menjauhkan buruh dari kesejahteraan dan mempersulit buruh dalam memenuhi hak sosial dan hak ekonomi.

Hak sosial dapat berupa hak untuk memperoleh jaminan sosial, hak memperoleh perumahan dan hak mendapatkan pendidikan, sedangkan hak ekonomi dapat berupa hak atas aktivitas perekonomian, hak mendapatkan

pekerjaan yang layak, hak untuk mendapatkan upah dan hak untuk bergabung dalam serikat buruh (Subawa, 2008). Pelanggaran yang terjadi atas hak ekonomi dan sosial terjadi disaat negara tidak berhasil memenuhi hak ekonomi dan sosial. Berpatokan pada hukum internasional, hak asasi memprioritaskan pemenuhan hak ekonomi dan sosial. Jika negara tidak berhasil dalam memenuhi kewajiban tersebut, maka dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran atas hak ekonomi dan sosial (Subawa, 2008).

Kebijakan Tapera jika dilihat dari laporan media Koran Perdjoeangan hanyalah akal-akalan pemerintah agar dapat mengutip uang dari masyarakat. Pemerintah tidak memberikan jaminan pada buruh untuk memiliki rumah, pendanaan juga diserahkan sepenuhnya kepada buruh tanpa ada bantuan finansial dari pemerintah dan kebijakan Tapera menambah daftar panjang iuran yang harus dibayarkan oleh buruh sehingga media Koran Perdjoeangan menolak pemberlakuan kebijakan Tapera. Jika dilihat dari sisi masyarakat, terdapat sentimen negatif yang tinggi terhadap kebijakan Tapera karena potongan yang diberlakukan dianggap terlalu memberatkan, khususnya bagi masyarakat yang memiliki penghasilan rendah yang menjadi target utama dari kebijakan ini (Rohmania & Rohmad, 2024).

*Survey* Litbang Kompas menemukan bahwa terdapat lebih banyak sentimen negatif dibandingkan sentimen positif tentang kebijakan Tapera. Umumnya sentimen negatif datang dari masyarakat kalangan menengah bawah yang menolak kebijakan Tapera dan tidak mau mengikuti kebijakan tersebut. Alasan

penolakan yang paling banyak ditemukan dalam jajak pendapat Litbang Kompas adalah potongan gaji sebanyak 3% setiap bulan yang dinilai memberatkan finansial masyarakat. Sementara itu, sentimen positif atau masyarakat yang mendukung kebijakan tidak terlalu mendominasi. *Survey* Litbang Kompas mengemukakan bahwa umumnya masyarakat yang menyetujui kebijakan Tapera adalah mereka yang berasal dari kalangan ekonomi atas karena faktor ekonomi bukan lagi menjadi persoalan bagi mereka (Kompas, 2024).

Pemerintah seharusnya memperhatikan aspek-aspek kebijakan yang dapat menimbulkan reaksi negatif, terutama mekanisme pemotongan gaji bagi iuran Tapera. Terlebih sasaran dari kebijakan ini adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Pemotongan gaji tentu menjadi hal yang krusial bagi buruh karena berpotensi semakin menjauhkan buruh dari kesejahteraan. Namun, pemerintah tidak mempertimbangkan hal tersebut. Pemerintah justru tetap memberlakukan pemotongan gaji dalam kebijakan yang Tapera. Pemerintah semakin mempersulit buruh untuk dapat hidup layak. Pemerintah hanya melihat buruh sebagai tenaga kerja tanpa memedulikan bahwa buruh adalah manusia dan masih sering mengalami ketidakadilan. Buruh selalu menjadi subjek yang dilanggar haknya dan senantiasa berjuang untuk mendapatkan haknya agar dapat memperoleh kehidupan yang layak (Febrianto, 2023).

Seringnya terjadi pelanggaran hak buruh menyebabkan buruh tergolong ke dalam kelompok marginal dan suara mereka kerap diabaikan. Maka dari itu, buruh membutuhkan media yang mampu menampung aspirasi dan suara mereka,

yaitu media alternatif. Media alternatif bertindak sebagai perpanjangan tangan untuk mengemukakan suara mereka yang kerap diabaikan. Media alternatif biasanya dimiliki oleh kelompok tertentu. Media alternatif sepenuhnya digunakan demi kepentingan kelompok. Media alternatif ditujukan untuk kelompok yang sebenarnya adalah mayoritas namun termarginalisasi (Birowo dalam Darmastuti, 2016).

Media alternatif menyampaikan isu yang tidak tersampaikan oleh media mainstream. Pada dasarnya, antara media arus utama dan media alternatif tujuannya sama, yaitu menyiarkan informasi kepada khalayak masyarakat. Bedanya hanya terletak pada kepemilikan dan bagaimana cara mengelolanya. Media arus utama dikelola oleh institusi tertentu, serta informasi yang disampaikan sekilas terlihat seperti informasi yang mencerminkan aspirasi masyarakat sesungguhnya (Darmastuti, 2016). Namun, informasi tersebut tidak benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat, salah satu contohnya adalah penyampaian informasi tentang buruh. Pada kenyataannya, media arus utama justru sering kali mendiskreditkan buruh dalam berita yang dimuat.

Media arus utama umumnya memberitakan buruh dengan bingkai pemberitaan yang sempit yang identik dengan kata tuntutan, demonstrasi, atau kerusuhan tanpa memperhatikan substansi tuntutan yang dilayangkan. Bingkai pemberitaan yang sempit itu cenderung mendiskreditkan buruh dan memperlihatkan ideologi dominan yang diyakini oleh media mainstream yang umumnya memiliki keberpihakan terhadap kapitalisme dan anti terhadap serikat

buruh (Kumar dalam Taufik, 2024). Lebih mudah untuk menemukan media yang memberitakan buruh dengan narasi yang sinis dibandingkan media yang benar-benar mengadvokasi isu kelompok buruh (Adiprasetio & Larasati, 2018). Irfansyah (dalam Adiprasetio & Larasati, 2018) menunjukkan bahwa salah satu portal tulisan terpercaya di Indonesia, yaitu Detik.com berulang kali memberitakan buruh dengan narasi yang sinis.

Selain portal tulisan Detik.com, sebuah penelitian oleh Asrianur (2021) mengenai “Media dan Diskriminasi Pemberitaan Aksi Unjuk Rasa Buruh Menolak UU Omnibuslaw pada 2022” memaparkan bahwa portal tulisan CNBC Indonesia dalam pemberitaannya banyak merundung buruh, terutama dalam aksi penolakan UU Cipta Kerja. Meskipun CNBC Indonesia tidak menjadi satu-satunya media yang merundung buruh dalam pemberitaannya, tetapi CNBC Indonesia menjadi media yang kerap melakukan perundungan terhadap buruh dalam aksi penolakan UU Cipta Kerja dibandingkan dengan media-media lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa buruh tidak memiliki ruang aman dalam pemberitaan di media arus utama.

Media arus utama digunakan oleh kelas dominan dan sangat sering dimanfaatkan sebagai alat kepentingan politik. Agenda yang terdapat dalam media arus utama dikendalikan oleh kepentingan pemilik modal dan selera pasar (Maryani & Adiprasetio, 2018). Salah satu penelitian terdahulu yang berjudul “Media Mainstream Sebagai Sarana Komunikasi” oleh Guntur dkk pada tahun 2023 menemukan bahwa media mainstream berpihak pada kelompok penguasa

secara halus lewat manipulasi teks secara interdiskurtif. Meskipun redaktur memiliki kekuasaan untuk menentukan arah pemberitaan, namun mereka masih mendapat tekanan dari kepentingan politik dan ekonomi sehingga pemberitaan yang dimuat bertujuan untuk mempromosikan kepentingan politik dan ekonomi kelompok penguasa. Berdasarkan penelitian tersebut, diketahui bahwa media mainstream cenderung berpihak pada pemerintah. Hasil temuan penelitian tersebut juga mendorong penelitian ini untuk mengkaji media alternatif dibandingkan media arus utama yang bias dalam pemberitaannya. Media alternatif dibutuhkan sebagai media yang dapat mengakomodasi suara masyarakat yang jarang terdengar (*voice the voiceless*), sehingga media alternatif mampu mewakili suara rakyat yang selama ini tidak mendapat tempat di media arus utama. Media alternatif menurut Cammaerts dan Carpentier (dalam Fenti & Eddyono, 2021) dipandang sebagai pelengkap media mainstream atau sebagai perlawanan terhadap hegemoni media mainstream. Media alternatif secara sederhana dimaksudkan sebagai media yang melakukan perlawanan kepada media arus utama (Amanda & Fitriawan, 2018).

Media alternatif adalah media yang digunakan oleh kelompok marginal untuk menyampaikan pesan yang diperjuangkan oleh kelompoknya, pesan yang biasanya tidak mendapat ruang di media arus utama (Maryani & Adiprasetyo, 2018). Media alternatif mengabdikan dirinya pada kepentingan kelompok dan hadir untuk menyuarakan suara kelompok yang kerap terpinggirkan. Maka dari itu, penelitian ini akan mengkaji media alternatif “Koran Perdjoengan.com”.

Koran Perdjoengan adalah portal media online yang khusus mengelola isu perburuhan dan aktif menyuarakan suara dan tuntutan buruh.

Koran Perdjoengan.com dipilih karena media ini adalah media komunitas yang dikelola dan dijalankan oleh organisasi serikat buruh FSPMI sehingga berpihak pada buruh. Konten di media ini juga ditulis oleh buruh berdasarkan pengalaman-pengalaman mereka sehingga tulisan tersebut merefleksikan hal yang mereka rasakan, mewakili pandangan dan juga keyakinan mereka. Selain itu, media Koran Perdjoengan memang secara khusus menyuarakan suara buruh dan konsisten dengan tema perburuhan, berbeda dengan media alternatif lain yang cenderung mengadvokasi banyak isu kelompok marginal, tidak hanya buruh saja. Hal ini semakin memperkuat media Koran Perdjoengan sebagai media alternatif yang berpihak dan menyuarakan suara buruh. Terlebih Koran Perdjoengan adalah media yang menjadi pilar dari organisasi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI). Koran Perdjoengan tercipta atas dasar pemikiran bahwa selama ini tidak ada media di Indonesia yang secara khusus memberitakan substransi tuntutan, perjuangan dan perlawanan buruh di Indonesia dan media Koran Perdjoengan menjadi corong perjuangan untuk suara buruh yang tersisihkan di media arus utama.

Salah satu penelitian terdahulu yang membahas mengenai peran media alternatif adalah penelitian Fenti dan Eddyono (2021) dengan judul “Analisis Wacana Kritis tentang Perempuan di Masa Pandemi Covid-19 pada Media Alternatif Magdalene.co”. Penelitian ini mengungkapkan bahwa perempuan

adalah kelompok yang terdampak efek pandemi lebih parah, terutama jika dilihat dari sisi sosial dan ekonomi. Magdalene.co berperan sebagai media alternatif yang mengadvokasi isu perempuan berupaya untuk untuk mengkomunikasikan, dan memberikan pemahaman kepada khalayak agar dapat menerapkan keadilan serta kesetaraan guna melawan ideologi patriarki. Tujuannya agar dapat membantu perempuan agar tidak berada pada posisi terpuruk di tengah pandemi Covid-19 yang melanda.

Pada penelitian ini masih memakai analisis wacana kritis seperti penelitian sebelumnya. Namun pada penelitian sebelumnya, analisis wacana kritis yang dipakai ialah analisis wacana kritis Sara Mills dan pada penelitian yang mengangkat tentang buruh ini akan memakai analisis wacana kritis Teun A. Van Dijk. Fokus pada penelitian juga berbeda, jika pada penelitian sebelumnya berfokus pada perempuan, maka penelitian ini fokus kepada buruh. Penelitian sebelumnya juga mengkaji media alternatif Magdalene.co yang berfokus pada isu perempuan, tetapi pada penelitian ini akan mengkaji media alternatif Koran Perdjoengan yang fokus pada isu perburuhan di Indonesia.

Unggahan tulisan yang dimuat di media mempunyai wacana, tidak terkecuali dengan pemberitaan mengenai Tapera. Wacana dapat dilihat dari narasi yang ada di pemberitaan, maupun foto yang ikut dimuat. Hal tersebut tentu memiliki makna, baik makna secara tersurat maupun secara tersirat. Analisis wacana membantu kita dalam mengungkapkan motif dan ideologi yang mendasari suatu teks tulisan, sehingga kita dapat memahami konteks secara lebih luas berdasarkan

informasi yang diberikan, serta mengurangi kebingungan dan keraguan terhadap keakuratan informasi.

Analisis wacana kritis adalah metode yang berusaha mengungkapkan gambaran suatu wacana yang ditulis atau diucapkan oleh seseorang, yang didalamnya terdapat makna bahasa dalam bentuk teks, audio, tulisan, dan gambar dari sudut pandang kritis (Pakpahan, dkk, 2024). Berangkat dari pemberitaan, analisis wacana kritis dapat membantu mengungkap seperti apa wacana kebijakan Tapera yang dibentuk di media Koran Perdjoengan. Peneliti menggunakan analisis wacana kritis untuk melihat wacana Tapera yang dimuat di dalam media Koran Perdjoengan dan menjelaskan struktur teks pada narasi yang terkait dengan pemberitaan Tapera yang diwacanakan oleh media.

Penelitian ini akan menggunakan teori hegemoni. Teori hegemoni Antonio Gramsci melihat bahwa dominasi yang dilakukan oleh kelompok penguasa tidak menggunakan dominasi kekuasaan atau kekerasan, tetapi dengan melibatkan konsensus dari masyarakat. Hegemoni terjadi karena adanya sebuah bentuk kesepakatan bersama atau persetujuan oleh masyarakat. Namun, konsensus yang ada di masyarakat muncul bukan karena keinginan masyarakat itu sendiri, melainkan karena mereka tidak memiliki bekal konseptual yang baik yang memungkinkan mereka untuk mencerna realitas sosial secara lebih efektif (Patria & Arief, 2009). Hal tersebut disebabkan oleh mekanisme kelembagaan dikuasai oleh kelompok penguasa sehingga tidak pernah memberikan ruang untuk kemunculan kesadaran kritis di masyarakat sehingga masyarakat menerima nilai-

nilai atau keyakinan kelompok penguasa tanpa adanya penolakan. Namun, teori hegemoni juga melihat di mana ada hegemoni, di sana terdapat perlawanan.

Wacana kebijakan Tapera di media alternatif Koran Perdjoengan dapat dianalisis dengan teori hegemoni dengan melihat bagaimana pemerintah berusaha untuk menyeragamkan pandangan masyarakat bahwa kebijakan Tapera adalah kebijakan pro-rakyat dan bagaimana masyarakat melakukan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah tersebut. Penelitian ini menarik untuk diteliti karena penelitian ini mengkaji wacana kebijakan Tapera bukan dari media arus utama, melainkan dari media alternatif sehingga memberikan perspektif yang berbeda karena semua tulisan di media Koran Perdjoengan merefleksikan pengalaman buruh. Oleh karena itu, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul “Wacana Kebijakan Tapera di Media Alternatif (Analisis Wacana Kritis Tulisan Tapera Pada Media Koran Perdjoengan.com).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana wacana kebijakan Tapera berperan sebagai kontra hegemoni dilihat dari tulisan di media alternatif Koran Perdjoengan?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tulisan terkait kebijakan Tapera di media alternatif Koran Perdjoengan yang mengandung wacana kontra hegemoni.

2. Untuk menganalisis wacana kebijakan Tapera di media Koran Perdjoengan yang menjadi kontra hegemoni bagi media arus utama.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

##### 1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan, khususnya bidang Ilmu Komunikasi dalam kajian kritis yang berfokus pada media. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa lainnya dalam kajian kritis yang berfokus pada bidang media, khususnya media alternatif.

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan atau perspektif baru kepada masyarakat bahwa tanpa disadari kita menerima hegemoni kelompok penguasa dari media yang dikonsumsi dan media alternatif berperan untuk memunculkan kesadaran di antara masyarakat.

